



ABSTRAK

IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN (BKBPP) DALAM MENGENDALIKAN PERTUMBUHAN PENDUDUK DI KABUPATEN ROKAN HULU

OLEH :

MUHAMMAD HAFIZON FATONI
NIM. 11375101749

Penelitian ini dilakukan di suatu daerah yaitu Kabupaten Rokan Hulu dengan didukung oleh suatu instansi yaitu Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Rokan Hulu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi Program Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) di seluruh wilayah Kabupaten Rokan Hulu yang di teknisi oleh instansi tersebut, apakah pelaksanaan program terkait sudah terlaksana berdasarkan peraturan yang ada atau sebaliknya. Kemudian tujuan penelitian ini juga untuk mengetahui hambatan-hambatan yang penulis temui dalam Implementasi Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) ini. Adapun jenis penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode kualitatif bersifat deskriptif. Kemudian Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah teknik cluster sampling (area sampling) yang digunakan dalam dua tahap, tahap pertama menentukan daerah karena lingkup populasi yang terlalu besar yaitu kabupaten, kemudian tahap kedua menentukan masyarakat yang dijadikan sampel. Kedua tahap tersebut ditentukan berdasarkan kriteria-kriteria (karakteristik) tertentu yang penulis tetapkan. Setelah ditentukan sampelnya maka peneliti menentukan jumlah sampelnya menggunakan rumus slovin dari keseluruhan sampel yang peneliti tetapkan kemudian didapatkanlah 100 sampel, dengan 7 key informant, maka responden penelitian sebanyak 107. Kemudian setelah mengetahui hasil persentase berdasarkan responden angket maupun key informant, peneliti menganalisis sehingga dapat disimpulkan bahwa Implementasi Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) di Kabupaten Rokan Hulu yang diteknisi oleh Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan cukup sesuai dilaksanakan berdasarkan peraturan-peraturan yang ada, namun hasil yang belum maksimal tersebut ternyata dihambat oleh beberapa faktor diantaranya seperti Rendahnya kualitas keterpaduan dan koordinasi yang dilakukan dari tingkat kabupaten, kecamatan, desa terhadap peraturan yang ada yaitu Undang-Undang No. 52 tahun 2009 dan ditindak lanjuti dengan lahirnya peraturan pemerintah (PP) No. 87 tahun 2014, kemudian kurangnya rasa tanggung jawab dan partisipasi untuk membenahi ekonomi dan sosial masing-masing baik itu dari tingkat aparaturnya setempat maupun masyarakatnya dengan berbagai alasan.

Kata Kunci : Implementasi, Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP)